

Karakteristik Komunikator politik¹

Oleh: Adiyana Slamet²

Sosiolog J.D. Halloran, seorang pengamat komunikasi massa mengatakan, bahwa banyak studi komunikasi mengabaikan satu karakteristik proses yang penting, yaitu bahwa komunikasi terjadi dalam satu matrik sosial. Situasi tempat komunikasi bermula, berkembang dan berlangsung secara terus-menerus adalah situasi sosial. Hubungan antara komunikator dan khalayak adalah bagian integral dari sistem sosial. Meskipun anggapan ini sederhana, ketidakpekaan banyak ahli teori komunikasi telah mengakibatkan ketidakseimbangan (Paul Halmos, 1969 : 7), apa yang dikatakan oleh Hallaron juga berlaku bagi komunikator politik (Nimmo, 1999 : 29).

Dalam komunikasi unsur komunikator merupakan bagian integral dan unsur yang sangat menentukan berlangsungnya proses komunikasi. Demikian halnya dengan pemegang kekuasaan, melaksanakan kekuasaan dan penyebaran pengaruh (politik) yang diklasifikasikan dalam komunikator politik utama yang memberi warna dominan terhadap kelangsungan proses komunikasi serta yang mengelola dan mengendalikan simbol-simbol komunikasi. Dalam Bukunya Nimmo (terjemahan Surjaman, 2005 : 16) bahwa komunikator politik ini adalah *pols* yakni politikus yang hidupnya dari manipulasi komunikasi, kemudian *vols* yaitu warga negara yang aktif dalam politik berdasarkan paruh waktu (*part time*) dan sukarela (*voluntary*). Lebih lanjut Nimmo mengidentifikasi tiga kategori komunikator (2005 : 30) atau kalau menurut Laswell (Suwardi, 1995 : 16) membagi komunikator politik secara umum, meliputi : (1) Politikus (*Pols*); (2) Komunikator profesional (*Pros*); (3) Aktivis (*Vols*)

Sedangkan komunikator profesional menurut Carey (Suwardi, 1997 : 17) adalah:

1. Sebagai Jurnalis, tugasnya memberi saran-saran tentang kondisi politik tertentu;
2. Sebagai promotor, yang bertindak sebagai sekretaris pers kepresidenan, konsultan politik pada masa pemilu presiden atau manajer kampanye politik;
3. Sebagai aktivis yang bertindak, sebagai juru bicara dari salah satu *interest group* serta pemuka pendapat

¹Disampaikan pada kuliah Komunikasi Politik Pertemuan Ke-5

² Dosen Komunikasi Politik Prodi Komunikasi FISIP UNIKOM

Melalui pendekatan sistem politik, maka terdapat dua aktor komunikasi (komunkator), *pertama* di struktur kekuasaan atau komunikator suprastruktur. *Kedua* di infrastruktur atau komunikator infrastruktur. Komunikator suprastruktur dikualifikasikan ke dalam dua level komunikator, yaitu komunikator utama dan komunikator pelaksana atau yang menangani masalah khusus. Dan Nimmo dalam judul buku "*Political Communication and Public Opinion in America*" (Harun dan Sumarno, 2006: 44-46) mengangkat pendapat James Rossenau dalam kaitan level nasional dan masalah khusus menggunakan istilah sebagai berikut:

- (1) Komunikator yang menangani masalah nasional digunakan istilah "*Governmental opinion makers*" atau disebut pembentuk opini pemerintah yang menangani masalah "*national multy issue maters*" yaitu menangani berbagai masalah nasional atau berlevel nasional, yang terdiri dari *executive official* yaitu para pejabat pemerintah dari mulai presiden sampai kabinet atau kementerian termasuk pimpinan departemen dengan seluruh jajarannya (eksekutif), kemudian jajaran legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Yudikatif sebagai badan peradilan.
- (2) Komunikator yang menangani masalah khusus yang disebut "*single issue opinion makers*" yaitu asisten atau sekretaris dan staff ahli dari departemen
- (3) Selain komunikator utama, ada juga komunikator pelaksana yaitu para pejabat yang berada di posisi provinsi dan kabupaten/kotamadya yang akan merealisasikan dan meneruskan program pemerintah pusat sampai ketingkat daerah

Nimmo (1999 : 28) menyebutkan bahwa semua orang adalah komunikator politik, siapapun yang dalam *setting* politik adalah komunikator politik. Hal ini terbentang mulai dari level terbawah (rakyat) sampai level atas (elit). Proses komunkasi politik menjadi begitu serba mencakup dan luas sehingga setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi komunikator politik .

Selanjutnya komunikator infrastruktur yang mempunyai fungsi politik (*input*) yaitu memberikan respon dari umpan balik atas kebijakan publik (*public policy*) yang dikeluarkan (*output*) oleh suprastruktur. Respon yang diberikan infrastruktur adalah berupa

tuntutan dan dukungan yang akan mempengaruhi proses pembuatan keputusan (*decision making process*) di konversi (diolah dan diracik) menjadi bahan pertimbangan atau alternatif untuk membuat kebijakan. Dalam proses sistem politik tersebut diungkap oleh G.A. Almond dan S. Coleman dikualifikasikan ke dalam lima kelompok, yaitu :

- (1) Partai politik (*political party*)
- (2) Kelompok kepentingan (*interest group*)
- (3) Kelompok penekan (*pressure group*)
- (4) Tokoh politik (*political figure*)
- (5) Alat-alat komunikasi politik (*political communication tools*)

Kelima kelompok komunikator infrastruktur tersebut sangat berpengaruh terhadap situasi kehidupan politik, karena mereka memiliki kemampuan menggerakkan massa dan mampu untuk memobilisasi pendapat umum agar berpihak kepada mereka. Karena itu elit-elit suprastruktur sangat berkepentingan untuk saling berhubungan dan menjalin komunikasi dengan komunikator infrastruktur terutama dalam kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya. Kelompok komunikator infrastruktur tersebut selalu berusaha untuk mendapatkan dukungan masyarakat pada waktu terjadi pergeseran atau pergantian elit kekuasaan seperti pada pemilihan umum dan pemilihan kepala negara dan kepala daerah.

Namun katagori politikus, tidak selalu berada di wilayah infrastruktur politik sebagaimana L.W. Dobb. Karena di wilayah supratruktur politik sendiri, ada beberapa peran dan posisi yang ditempati oleh politikus, seperti di lembaga legislatif (DPR/DPRD) yang sebelum dan sedang mereka menjabat berprofesi sebagai politikus atau aktifis dari kader partai politik. Bahkan di lembaga eksekutif dalam katagori jabatan politis, seperti presiden, gubernur dan bupati dengan sistem pemilihan langsung yang berasal dari partai politik, baik kader asli partai politik atau partai politik sendiri yang meminang seseorang untuk "dijagokan". Termasuk menteri-menteri ditempati oleh para kader partai politik sebagai pembagian "kue kekuasaan" dari elit terpilih. Sebagaimana menurut Nimmo (2005 : 30-32) bahwa politikus adalah seseorang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah harus dan memang berkomunikasi tentang politik, bahkan Nimmo mengesampingkan apakah seseorang tersebut dipilih, ditunjuk, atau pejabat karier

sekalipun, termasuk tidak mengindahkan apakah jabatan utama sebagai eksekutif, legislatif atau yudikatif. Dalam kewenangannya politikus yaitu berkomunikasi sebagai wakil dari kelompok yang mengajukan dan melindungi kepentingan politik.

Politikus sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya, komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, dengan mencari pengaruh lewat komunikasi. Baik lewat media massa, orasi, pertemuan dan rapat dalam kampanye, kinerja tim sukses dan lain sebagainya. Sebagaimana menurut Nimmo (dalam Arriane, 2006 : 28) bahwa:

Politisi sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan untuk melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya, komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, sehingga jika dirangkum, maka politikus mencari pengaruh lewat komunikasi.

Lebih lanjut L.W. Dobb (Harun dan Sumarno, 2006 : 55-57) menjelaskan tentang politikus (jamak) atau politisi (tunggal), bahwa dalam kenyataan empiris para politisi berada pada dua struktur politik yaitu di infrastruktur politik (fungsi input) yaitu di dalam lima katagori komunikator infrastruktur yang telah disebutkan diatas. Namun yang paling bisa terditeksi politikus berada di sebuah partai politik (parpol) karena kepentingan dan aktualisasinya lebih kongkrit atau istilahnya melakukan "politik praktis".

Kemudian politisi di suprastruktur politik (fungsi output) yaitu berada di posisi legislatif (DPR) atau di eksekutif (kabinet), yang sebenarnya mereka berasal dari politikus yang mendapat kesempatan duduk di legislatif dan eksekutif sebagai hasil dari kemenangan pemilihan umum atau hasil dari komitmen, konsensus dan pembagian kekuasaan dari penguasa kepada partai politik dalam menjaga kelanggengan kekuasaan. Maka dalam istilah politik ada koalisi atau gabungan dua kekuatan, seperti di Indonesia contohnya ada istilah "kabinet pelangi" atau "kabinet gotong royong" yang memiliki makna bahwa sekalipun kedudukan kekuasaan puncak yaitu presiden dan wakil presiden direbut oleh salah satu partai, namun dalam membentuk kabinet atau kementerian dipetakan dan

ditawarkan dan dibagikan kepada partai-partai lain yang dahulu menjadi pesaing dalam pemilihan umum. Hal tersebut dilakukan bagi kepentingan untuk menjaga stabilitas pemerintahan, menghindari oposisi dan untuk mempertahankan kekuasaan.

Adapun politisi infrastruktur politik dapat dikualifikasikan ke dalam :

- (1) Politisi yang bergabung kedalam wadah partai politik;
- (2) Politisi yang menekuni perkembangan dan peristiwa politik atau biasa disebut pengamat politik;
- (3) Politisi yang mengembangkan konsep dan pemikiran melalui tulisan-tulisan dan hasil penelitian disebut juga dengan ilmuwan politik;
- (4) Politisi yang tergabung dalam suatu asosiasi yang memiliki latar belakang keilmuan politik seperti Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

Sedangkan menurut Elihu Katz (dalam Harsono, 1997 :17) ada dua tipe politikus yaitu :

- (1) Wakil rakyat atau partisan, ciri-cirinya mencari prestise, kemudahan-kemudahan atau kekuasaan yang diperjuangkan oleh kelompok;
- (2) Idiolog atau *Policy Formulator*, yang memperjuangkan nilai-nilai seseorang untuk suatu perubahan dan pembaharuan secara revolusioner

Kemudian menurut Friedich Nietsche bahwa ada keprihatinan dimana politikus hanyalah aktor yang menciptakan citra ideal untuk diri mereka sendiri, dan citra adalah suatu integrasi mental yang halus dari berbagai sifat yang diproyeksikan oleh orang itu, kemudian dipersepsi dan diinterpretasikan oleh rakyat menurut kepercayaan, nilai dan pengharapan mereka. Nimmo (Arriane, 2006 : 30) mengungkapkan bahwa kebanyakan politisi mendapat kesulitan besar untuk bisa dikenal bahkan untuk mempunyai citra. Maka karena itulah politisi dengan berbagai upaya untuk memperoleh citra positif.